

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH dan
DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL
(STUDY KASUS PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**NUGROHO SURATNO PUTRO
NIM. C2C307036**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nugroho Suratno Putro
Nomor Induk Mahasiswa : C2C3 07 036
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN
EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH dan DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL
(STUDI KASUS PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH)**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Sugeng Pamudji., M.Si, Akt.

Semarang, Oktober 2010
Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si, Akt.)
NIP. 19490124 198001 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini saya, Nugroho Suratno Putro, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan yang menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang,

Nugroho Suratno Putro

NIM. C2C307036

ABSTRACT

The implementation of fiscal decentralization in addition to giving authority to local governments also affect the ability of regions to meet the public interest. The aim of this study is to examine the effect of Economic Growth, Regional Revenue and General Allocation Fund to the Capital Budget Appropriations.

Samples used in the study were 35 Government District in Central Java which is taken by using census method. The analytical tool used is multiple regression test.

The test results showed that only the General Allocation Fund which significantly influence the allocation of capital expenditure while the Economic Growth and Regional Income does not significantly influence the allocation of capital expenditure budget.

Keywords: Regional Expenditure and Income Budgets, Economic Growth, Capital Expenditures

ABSTRAKSI

Pelaksanaan desentralisasi fiskal selain memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi kepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diambil dengan menggunakan metode sensus. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Kata Kunci : APBD, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan mengucap Alhamdulillahirobil'alamin atas limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Modal (Studi kasus pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah)” telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini yang akan dijadikan pertimbangan pada penelitian selanjutnya. Selama penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Chabachib, M.Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si, Akt selaku dosen pembimbing, yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Daljono, SE, M.Si, Akt selaku dosen wali selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Bapak dan Ibu tercinta yang dengan sabar dan penuh kasih sayang dalam membimbingku dan mendidikku hingga menjadikanku seperti yang sekarang ini.
5. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Undip yang telah menjadikan penulis memiliki ilmu yang begitu banyak dan berguna. Semua karyawan dan staf Tata Usaha FE Undip terima kasih atas bantuannya.
6. Seluruh teman di kelas Akuntansi angkatan 2007 yang telah lulus semuanya semoga kita sukses di masa yang akan datang.
7. Seluruh teman di Biro Keuangan Setda Prov. Jateng khususnya pada Bagian Pengelolaan Kas Daerah yang senantiasa membantu dalam pencarian data guna kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman di Bappeda Prov. Jateng yang juga banyak membantu dan memberikan masukan guna terselesaikannya skripsi ini.
9. *Someone Special* yang dengan setia menunggu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, Nopember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja.....	7
2.1.2 Siklus Perencanaan Anggaran Daerah.....	8
2.1.3 Struktur APBD	9
2.1.4 Belanja Modal dalam Anggaran Daerah	10
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.5.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal	12
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.6.1 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal	13
2.1.7 Dana Alokasi Umum	14
2.1.7.1 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Teoritis.....	16
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian	17
2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Belanja Modal.....	17
2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal.....	19

2.4.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		22
3.1	Jenis Penelitian	22
3.2	Populasi dan Metode Pengambilan Sampel	22
3.3	Jenis dan Sumber Data	23
3.4	Metode Pengumpulan Data	23
3.5	Variabel Penelitian	24
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	24
3.6.1	Belanja modal	24
3.6.2	Pertumbuhan Ekonomi	25
3.6.3	Pendapatan Asli Daerah.....	25
3.6.4	Dana Alokasi Umum	25
3.7	Metode Analisis Data.....	26
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	27
3.7.2	Uji Normalitas Data.....	27
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	27
3.7.4	Uji Regresi Berganda.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Deskriptif Objek Penelitian.....	33
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	34
4.3	Uji Normalitas	36
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	37
4.4.2	Uji Heteroskedasitas	38
4.4.3	Uji Auto Korelasi.....	39
4.5	Uji Regresi Berganda	40
4.6	Pengujian Hipotesis.....	42
4.6.1	Uji Statistik t.....	42
4.6.1.1	Hipotesis Pertama	42
4.6.1.2	Hipotesis Kedua.....	43
4.6.1.3	Hipotesis Ketiga	43
4.6.2	Uji Statistik F.....	43
4.6.3	Koefisien Determinasi	44
4.7	Pembahasan	44
4.7.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Belanja Modal.....	44

4.7.2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal.....	45
4.7.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal.....	46
BAB V	PENUTUP	47
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	48
5.3	Saran	48

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	33
Tabel 4.2.	Descriptive Statistics.....	34
Tabel 4.3.	Hasil Uji Multikolinieritas	38
Tabel 4.4.	Hasil Uji Auto Korelasi.....	40
Tabel 4.5.	Hasil Uji Regresi Berganda.....	41
Tabel 4.6.	Hasil Uji F.....	43
Tabel 4.7.	Koefisien Determinasi.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teoritis.....	17
Gambar 4.1.	Hasil Uji Normalitas	37
Gambar 4.2.	Hasil Uji Heteroskedasitas	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah

daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ini

ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya dari total anggaran belanja.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya seperti terlihat

dalam lampiran dimana belanja modal hanya mendapatkan persentase sebesar 7,68 % dari total PAD pada tahun 2006.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang

semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan faktor DAK sebagai variabel independen yang mempengaruhi anggaran belanja modal.

Dari latar belakang diatas serta penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum seharusnya berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan dimana hanya dilakukan pada periode 2004-2005, oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian ulang dengan penggunaan rentang periode yang lebih panjang (3 tahun) untuk membuktikan konsistensi penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yulia Yustikasari (2006) dengan judul penelitian sebagai berikut : **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah)”**

1.2 Perumusan Masalah

Pentingnya belanja modal untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal ?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal
2. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal
3. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
2. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap anggaran belanja modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

2.1.2 Siklus Perencanaan Anggaran Daerah

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD.
2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
3. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

2.1.3 Struktur APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Permendagri No.13 Tahun 2006).

2.1.4 Belanja Modal dalam Anggaran Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Proses kenaikan output per kapita diproksi dengan

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB) yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah.

2.1.5.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Bratakusumah & Solihin (2002) mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan untuk guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.6.1 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembanguna yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

2.1.7 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain.

2.1.7.1 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2004)	<ul style="list-style-type: none">• Dana Alokasi Umum• Pendapatan Asli Daerah• Belanja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah• Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah
2.	Priyo Hari Adi (2006)	<ul style="list-style-type: none">• Pertumbuhan Ekonomi Daerah• Belanja Pembangunan• Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD• Belanja Pembangunan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan PAD
3.	Yulia Yustikasari &	<ul style="list-style-type: none">• Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none">• Pertumbuhan Ekonomi

	Darwanto (2006)	<p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum • Belanja Modal 	<p>berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal • Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal
--	-----------------	---	---

2.3 Kerangka Teoritis

Pemberian otonomi daerah yang lebih besar akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi tersebut akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan belanja modal Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan publik sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Peningkatan PAD diikuti pula dengan peningkatan Anggaran Belanja Modal yang signifikan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal.

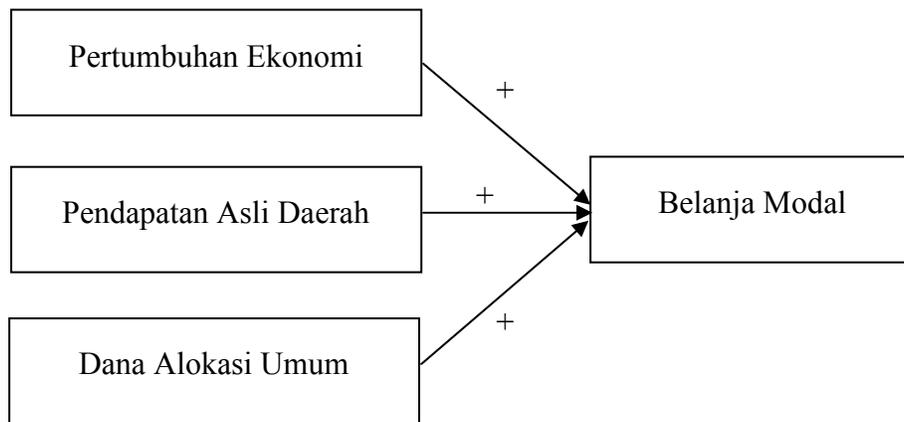
Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dapat digunakan untuk membiayai fungsi layanan umum daerah. Peningkatan nilai DAU yang

ditransfer ke Daerah diikuti oleh peningkatan Anggaran Belanja Modal sehingga terdapat pengaruh DAU terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Belanja

Modal

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) yang menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oates (2005), Lin & Liu (2000) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006).

Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004). Studi Abdullah (2004) juga menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam

belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja

Modal

Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004).

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Abdullah & Halim (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima. Sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasikan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel.

3.2 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dari tahun 2006-2008.

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indriantoro & Supomo, 1999). Berdasarkan karakteristiknya yang dipakai sebagai sampel adalah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang memiliki pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana Kabupaten dan Kota tersebut menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 2006-2008.

Dari karakteristik di atas dapat dilihat yang termasuk sampel adalah keseluruhan dari populasi. Dengan demikian maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah sejumlah 35 kabupaten/kota.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain.

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah :

1. Data Laporan Realisasi APBD tahun 2006-2008, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet dimana dari dokumen ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, dan bersifat obyektif.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai variabel dependen.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.6.1 Belanja modal

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Indikator variabel ini diukur dengan :

- a. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- b. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.
- c. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Dapat disimpulkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,} \\ \text{Irigasi dan Jaringan} + \text{belanja Aset Lainnya}$$

3.6.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRBt}-\text{PDRBt-1})/(\text{PDRBt-1}) \times 100\%$$

3.6.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

3.6.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dimana kebutuhan pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sehingga DAU untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai responden atau data variabel yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi.

3.7.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik yaitu dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Data akan normal jika signifikansinya $< \alpha = 0,05$. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tetapi jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model distribusi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat bebas dari asumsi klasik, dimana data tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan

heterokedastisitas. Untuk itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

1. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas untuk menguji korelasi antara variabel bebas (independen) dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflasi Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan variabel bebas lainnya. Semua variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan regresi harus mempunyai tolerance di atas 10%. Pada umumnya jika VIF lebih besar daripada 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolonieritas dengan variabel bebas lainnya.

2. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedasitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedasitas.

3. Uji Auto Korelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan model Durbin Watson (*dw test*). Autokorelasi adalah keadaan dimana *variabel error-term* pada periode tertentu berkorelasi dengan *variabel error-term* pada periode lain yang bermakna *variabel error-term* tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat. Langkah pendeteksiannya adalah dengan membandingkan nilai Durbin Watson Statistic Table dengan H_0 tidak ada autokorelasi bila DW berada di :

0 (a) dl (b) du (c) (4-du) (d) (4-dl) (e) 4

H_0 = tidak ada autokorelasi

(a) = daerah menolak H_0 = ada autokorelasi positif

(b) = daerah ragu-ragu

(c) = daerah tidak menolak H_0 = tidak ada auto korelasi positif atau negatif

(d) = daerah ragu-ragu

(e) = daerah menolak H_0 = ada autokorelasi negatif.

3.7.4 Uji Regresi Berganda

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*), hal ini sesuai dengan rumusan

masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = error

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi:

1. Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

Ho : $\beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Ho : $\beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan H₁ ditolak

b. Jika t hitung > t tabel maka H₁ diterima dan Ho ditolak

2. Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

3. Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.